

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

**Oleh
Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar
NIM. 05020421021**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar
NIM : 05020421021
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Pengawasan Badan permusyawaratan Desa
Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa
Berdasarkan Undang-Undang Monor 6 Tahun
2014 Tentang Desa

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Mei 2025

Saya yang menyatakan,

A pink rectangular official stamp with the text "KANTOR KEMENTERIAN" and "KEMENTERIAN" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. The signature appears to be "Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar".

Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar
NIM. 05020421021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

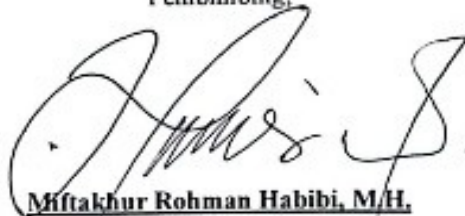
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar
NIM. : 05020421021
Judul : Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap
Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Studi
Kasus Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten
Nganjuk Provinsi Jawa Timur

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 15 Mei 2025

Pembimbing,



Miftakhur Rohman Habibi, M.H.
NIP. 198812162019031014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

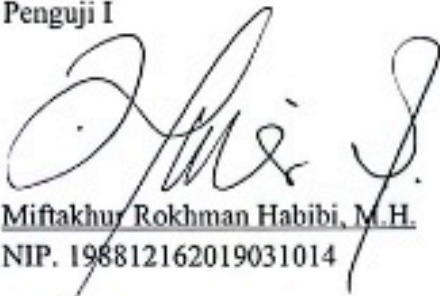
Nama : Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar

NIM. : 05020421021

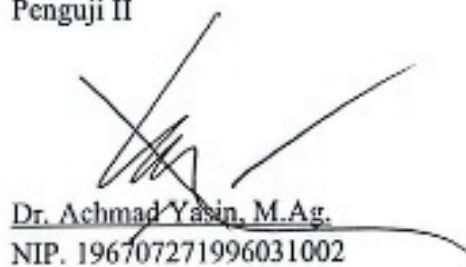
telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 05 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

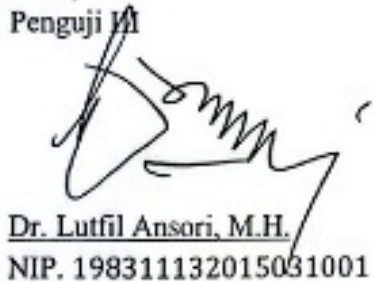
Penguji I


Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.
NIP. 198812162019031014

Penguji II


Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III


Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji IV


Abdul Haris Fjri Anto, M. Si.
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 10 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,


Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar
NIM : 05020421021
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : jabbararbi07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten
Nganjuk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juli 2025
Penulis

(Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar, S.H.)

ABSTRAK

Penelitian lapangan dalam skripsi ini adalah "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi Kasus Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur". Dua pertanyaan utama yang ingin dijawab oleh penelitian ini adalah: Pertama, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagaimana mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo? Kedua, berkenaan dengan gagasan tanggung jawab kepemimpinan dalam fiqh siyāsah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagaimana Badan Permusyawaratan Desa mengawasi pembangunan infrastruktur di Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo.

Skripsi ini menyajikan suatu kajian hukum empiris yang didasarkan pada data lapangan yang dikumpulkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sumber data primer meliputi wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa, selain itu data sekunder meliputi karya ilmiah yang dipublikasikan, jurnal, dan tesis, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Pendekatan analisis deduktif membantu menganalisis dan mengkaji data.

Hasil penelitian ini mengungkap banyak hal penting. *Pertama*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Babadan melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur desa setempat. Pengawasan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap pertama sebelum kegiatan dimulai, tahap kedua saat pelaksanaan, dan tahap ketiga setelah kegiatan selesai. Ketiga tahapan tersebut telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di dalamnya. *Kedua*, Pelaksanaan mekanisme pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Babadan dinilai belum maksimal. *Ketiga*, terdapat dua kendala utama yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia dan buruknya komunikasi dengan pemerintah setempat, khususnya dengan Kepala Desa di pemerintahan Desa.

Peneliti menyoroti perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman semua aspek, khususnya kepala desa sebagai pemimpin masyarakat beserta jajarannya, serta perlunya penguatan kapasitas dalam pengelolaan desa. Hal ini diperlukan guna memastikan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tujuan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	27
BAB II	30
TINJAUAN TEORI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KEPEMIMPINANNYA MENURUT TEORI <i>GOOD GOVERNANCE</i>.....	30
A. Teori Good Governance	30
B. Teori Fikih Siyasah	36
C. Teori Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah.....	40
D. Teori Pengawasan	43
E. Konsep Pembangunan Desa	50

F. Pengaturan Tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Babadan Kecamatan Patianrowo	63
BAB III.....	74
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA BABADAN KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014	74
A. Profil Desa Babadan.....	74
B. Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pemerintahan Desa babadan....	76
C. Kendala-kendala Badan Permusyawaratan Desa babadan dalam Melakukan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Desa.....	96
BAB IV	98
ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BABADAN KECAMATAN PETIANROWO KABUPATEN NGANJUK.....	98
A. Penerapan Sistem Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Babadan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	98
B. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa ditinjau dari Prespektif Kepemimpinan dalam Fikih Siyasah.....	109
BAB V PENUTUP	116
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN.....	128

DAFTAR PUSTAKA

- A., Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*,. Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdul Rojak, Jeje. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
- Afrida, Zunia. "Profil Desa Babadan Serta Sistem Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)," n.d.
<https://dejournalszunia.blogspot.com/2012/03/profil-desa-babadan-nganjuk.html>.
- Aji Dwiatmaja, Ignatius, Muhammad Imam Alfikri, and Imran Khairan Ali. "Studi kasus Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Kehidupan Masyarakat Melalui Kacamata Sosiologi: Tanda Tanya Pembangunan Infrastruktur Jalur Kereta Api trans-Sulawesi." *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* Vol. 2 No. 2 (July 2024): 78–82.
- Aji, Muhamad bayu. *Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Perspektif Undang- Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Fiqih Siyasah*. Tulungagung: Skripsi-Institut Agama Islam negeri, 2019.
- Almasri, and Dewi Deswimar. "Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan." *Jurnal El-Riyasah* Vol. 5, No. 1 (2014): 41–52.
- Andrik. "Wawancara Sekretaris Desa Babadan," February 18, 2025.
- Arkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara, 2019.
- Chanafi. "Wawancara Warga Desa Babadan," February 13, 2025.
- Christine Ayu Setyaningrum, and Fifiana Wisnaeni. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa." *Jurnal Pembangunan Hukum* Vol. 1, No. 2 (2019): 158–170.
- Dede Rosyada, Dkk. *Demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat Madani*. Jakarta Selatan: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Dian G Purba and dkk. "Analisis Perkembangan Desa yang Sedang Berkembang" Vol. 2, No. 4 (July 2024): 40–47.
- ,dkk, Mayora. "Strategi Peningkatan Infrastruktur Desa Untuk Mendorong Perekonomian Di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa." *Ebisnis Manajemen* Vol. 3, No. 1 (2025): 57–65.

- Doddy Nur Andriyan. *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial Dengan Multipartai Di Indonesia*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2016.
- Donnelley, Gibson, and Ivancevich. *Manajemen Edisi Sembilan Jilid 1, Terj: Zuhad Ichyaudin*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Effendi, Usman. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Eko, Sutoro. *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembang Pembaharuan Desa, 2014.
- Endah. "Wawancara Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Babadan," February 14, 2025.
- Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018.
- G. Suharto, Didik. "Penyelenggaraan pemerintahan Desa Dalam Prespektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik." *Jurnal Bina Praja* Vol. 4, Nom 3 (September 2022): 153–160.
- Hambali, M. Ridlwan and dkk. *Etika Profesi*. Bojonegoro: CV. AGRAPANA MEDIA, 2021.
- Hamidi, Jazim. *Dekontruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah: The Turning Poin of Local Autonomy*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010.
- H.M, Syafi'i. *Strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah: perspektif teoritik*. Malang: Averroes press, 2007.
- HR, Ridwan. *Hukum Adinistrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa: dalam Konstitusi Indonesiasejak Kemerdekaan hingga Era reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Ibnu Syarif, Mugar, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ishaq, Dr H. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi." *Alfabeta, Bandung* (2017).
- Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-30*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

- Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyāsah al-Syar’iyyah*. Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiah, 1995.
- Juhir, Jusuf. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Jusuf Juhir. *Aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Khairudin, Sartono, Aminah, Tina Miniawati Barusman, and Afrizal Nilwan. “Menilai Pembangunan Good Government Governance di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 14 No. 2 (September 2023): 132–142.
- Kimbal, Marthen. “Partisipasi Politik Dalam Proses Pembangunan Desa di Kecamatan Wori kabupaten Minahasa Utara.” *Sosiohumaniora* 20, no. 3 (November 2, 2018): 282. Accessed December 8, 2024. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/19018>.
- Komarudin. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, n.d.
- Leonardo Maykel Palandeng, Novi R. Pioh, and Trilke Erita Tulung. “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDesa.” *Polotico: Jurnal Ilmu Politik* Vol. 11, No 3 (July 2022): 132–145.
- Liber Sonata, Depri. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Eneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8, No. 1 (2020): 15–35.
- Maringan Marsy Simbolon. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. 1st ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Maschab, Mashuri. *Politik pemerintahan desa di Indonesia*. Cetakan I. Yogyakarta: Research Centre of Politics and Government, Department of Politics & Government, FISIPOL UGM, 2013.
- Maya Puspita Dewi. *Monitoring dan evaluasi Program Chapter 1-7*. Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2023.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Munawir Sjadzali. *Islam dan tata negara : ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Mutakallim. "Pengawasan, Evaluasi, dan Umpan Balik Strategik." *Rumah Jurnal UIN Alaudin* Vol. 5, No. 2 (December 2016): 351–365.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Ndraha, Taliziduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Nugroho, Mohammad Fiqqri Fajar. "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Telaah atas Pelaksanaan PERDA No 4 tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)." *Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2016).
- Nuraini, Siti. "HUBUNGAN KEKUASAAN ELIT PEMERINTAHAN DESA." *Bekasi, FISIP UNISMA* (2010).
- Nurhidayat, Ipan. "Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia." *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government* Vol. 1, No. 1 (February 2023): 40–52.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009.
- Nurul Huda, Muhamad. "Kedudukan Dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd Serta Relevansinya Pada Kinerja DPR." *Jurnal Kenegaraan dan Politik Islam* Vol. 2, No. 1 (June 2022).
- P.Siagian, Sondang. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rahmatin, Arihun. "Implementasi kebijakan Disiplin PNS dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Camat Utan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal MSDA* Vol. 6, No. 2 (December 2018): 149–170.

- Raja Dolok, Kevin Notario, and Fifiana Wisnaeni. "Peranan Politik Hukum Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pokok Agraria di Indonesia." *NOTARIUS* Vol. 15, No 2 (2022): 1022–1036.
- Rakhmat. "Reformasi Birokrasi Publik dalam Prespektif Good Governance." *Jurnal Paradigma* Vol. 2, No. 1 (April 2013): 1–9.
- R.L., Manthis, and Jackson J.H. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Sabri, Muh. *Peran Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan demokrasi Desa Di Desa Buangai Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*. Kota Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.
- Sadono Sukirno, Wan Sabri Husin, Danny Indrianto, Charles Sianturi, and Kurniawan Saefullah. *Pengantar Bisnis*. Ed. 1, Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2011.
- Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Samsu, La. "Al-Sultāh Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyyah, Al-Sultāh Al-Qadā'iyyah." *TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 13, No. 1 (2017): 155–171.
- Santoso, M. Agus. "Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah." *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.03, No. 02 (2020): 1–22.
- Saprianda, Irgo. "Efektivitas Kinerja Pegawai Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Keutan Singingi." *JUHANPERAK* Vol. 5, No. 1 (June 2018): 544–560.
- Saputra, Angga Deka. "Sistem Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap pembangunan Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa." *Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* (2019).
- Sasmita, Raharjo. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Setyono, Joko. "Good Governance Dalam Prespektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)." *Jurnal Muqtasid* Vol. 6, No. 1 (June 2015): 25–40.
- Shodiq, Ali. "Wawancara Warga Desa Babadan," February 13, 2025.
- Sirajuddin. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Malang: Sentara Press, 2016.

- Siti Hadiyanti Dini Islamiati and Masyitoh. "Proses dan Pelaksanaan Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dalam Melakukan Kepemimpinan." *Jurnal Dirosah Islamiyah* Vol. 6, No. 3 (2024): 1053–1066.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Pergeseran paradigma : dalam kajian-kajian sosial dan hukum*. Malang: Setara Press, 2017.
- Solehkan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Sentara Press, 2014.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.
- Stoner, and James A.F. *Manajemen, Terjemahan: Antarikso, Dkk, Erlangga*. Jakarta, 2006.
- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sujanto. *Beberapa pengertian di bidang pengawasan: edisi revisi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Sukardja. *Hukum tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Serambi Hukum* Vol 16 No 02 (2023): 101–113.
- Sumarto, Hetifah SJ. *Inovasi, Partisipasi, Dan Good Governance: 20 Prakasa Inovatif Dan Partisipatif Di Indonesia*. Indonesia: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Suparjan, Suyatno, and Hempri. *Pengembangan Masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2003.
- Syaiful Hidayat. "Tatanegara Dalam Prespektir Fikih Siyasah." *Tafaquh* Vol.1, No. 2 (December 2, 2013).
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Syukur, Iskandar. "Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi." *Jurnal Hukum ekonomi Syariah* Vol. 11, No. 01 (2019).

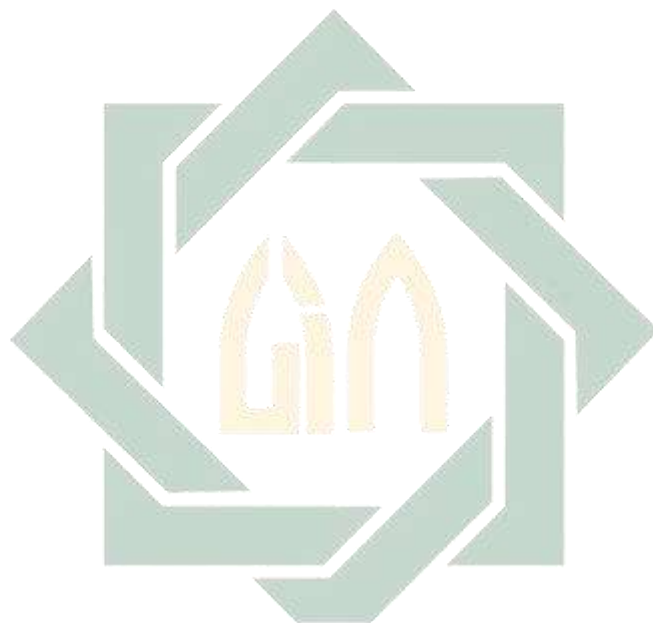
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995.
- Trisianto, Chrisantus. "Penggunaan Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi pembangunan Pedesaan." *Jurnal ESIT (E-Bisnis, Sistem Informasi, Teknologi Informasi)* Vol. 12, No. 1 (April 2018): 7–21.
- Wahyu Abdul Jafar. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol.3, No. 1 (2018).
- Wangka Ihe, Yusuf, Ronald Mawuntu, and Grace M.F. Karwur. "Tinjauan Hukum Mengenai Wewenang Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas sam Ratulangi: lex Privatum* Vol. 12, No. 2 (July 2023).
- Wardoyo, Gondang Purwantoro. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi (Studi Di Desa Batusari Kabupaten Wonosobo)." *Semarang: Universitas Negeri Semarang* (2010).
- Wiwin. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba." *Makasar: Universitas Hasanuddin* (2017).
- Yunus, Riswan. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9, No. 2 (July 2018).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa*. Nganjuk, 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89 tahun, 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*, n.d. Accessed November 13, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/111737/permendagri-no-114-tahun-2014>.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*. Jakarta, 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta, 2014.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta, 2024.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta, 2014.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Jakarta, 1999.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A